GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Terumbu Karang
Tanggal : 28 Desember 2006
Hari : kamis
Halaman : 23

Terumbu Karang Terancam Rusak Parah

Padang, Kompas - Terumbu karang di perairan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang merupakan aset industri pariwisata di wilayah itu kini terancam rusak. Jika dijaga dan dikelola dengan baik, alam bawah laut Mentawai tak kalah dengan Bunaken di Sulawesi Utara.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai melalui Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap) melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat pada 10 desa di empat kecamatan.

"Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang adalah program nasional yang berbasis masyarakat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai Khairil Anwar, Rabu (27/12) di Padang.

Dalam program ini, masyarakat digugah kesadarannya akan perlunya pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara lestari. Sepuluh desa yang menjadi lokasi program Coremap di Kepulauan Mentawai adalah Sigapogna, Malacan, Samukop, Saliguma, Katurai, Tuapejat, Bosua, Sikakap, Makalo, dan Sinakala.

Menurut peneliti terumbu karang dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang, Yempita Efendi, karena gangguan manusia akibat dari kemiskinan, kerusakan terumbu karang sudah sangat mencemaskan.

Yempita mengungkapkan, di Mentawai ada sebuah pulau yang tutupan karangnya masih lestari. Agar tidak dirusak, nama pulau itu masih dirahasiakan. (NAL)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Prioritas

Wagub mengatakan, prioritas kebijakan itu karena dampak pembalakan liar sangat luas. Diantaranya peningkatan luas degradasi hutan, kerusakan dan pemusnahan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah serta rusaknya ekosistem hutan.

Ditandaskan, penebangan hutan yang tidak terkendali membuat perubahan iklim lokal, regional bahkan global serta peningkatan potensi kebakaran hutan.

"*Illegal logging* termasuk masalah yang rumit diatasi karena terkait erat dengan permasalahan sosial ekonomi lain, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian yang sulit," tandas Wagub.

Selain itu, sempitnya lapangan pekerjaan dan lemahnya penegakan hukum ikut memperparah kerusakan hutan. "Kondisi ini diperparah oleh ulah segelintir oknum, yakni cukong tebangan liar maupun aparat yang sengaja memberikan peluang terjadinya penebangan liar," ujar Diran. [106]

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup